

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tujuan dari laporan keuangan menurut kerangka konseptual PSAK adalah menyediakan informasi bagi investor dan kreditur, serta calon investor dan kreditur, yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomisnya. Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar bagi para investor dan calon investor untuk pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dapat memberikan gambaran sumber daya ekonomis, dan membantu investor dan kreditur untuk menilai prospek arus kas di masa mendatang. Informasi yang lengkap, akurat, serta tepat waktu, memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan secara rasional, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan (Sembiring, 2005).

International Financial Reporting Standards (IFRS) merupakan pedoman penyusunan laporan keuangan yang diterima secara global. IFRS diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board (IASB)* sebelumnya bernama *International Accounting Standards Committee (IASC)* yang telah didukung dan disepakati oleh lebih dari 150 negara. *Financial Accounting Standards Board (FASB)* merupakan salah satu organisasi yang ada di Amerika Serikat dan sekaligus sebagai dewan penyusun *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*.

Tahun 2008 pemerintah Indonesia yang berperan sebagai anggota *The Group of Twenty* (G20 Forum) telah bersepakat untuk melakukan konvergensi terhadap IFRS. IAI mencangkan bahwa standar akuntansi internasional IFRS akan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2012 secara keseluruhan (www.iaiglobal.or.id, 2010). Adopsi secara bertahap terhadap IFRS telah dilakukan oleh IAI dengan melakukan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disesuaikan dengan IFRS, sehingga perusahaan *go public* wajib mengungkapkan informasi keuangannya berdasarkan prinsip akuntansi baru atau revisi yang mulai efektif secara bertahap sejak tahun 2008.

Kieso, *et al.* (2007) menyatakan bahwa salah satu prinsip dalam *conceptual framework of financial reporting* adalah *full disclosure*, yaitu pengungkapan lengkap semua informasi yang relevan. *Full disclosure* menekankan pada pengungkapan yang lebih luas yang diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara *agent* dan *principal*. Sebuah laporan keuangan yang berkualitas tinggi dapat memberi andil dalam meningkatkan kualitas keputusan ekonomi yang dibuat oleh manager dan oleh penyedia modal seperti investor dan kreditor.

Suhardjanto dan Miranti (2009) *Full disclosure* dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: *mandatory disclosure* (pengungkapan wajib) dan *voluntary disclosure* (pengungkapan sukarela). *Mandatory disclosure* (pengungkapan wajib) mengacu pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang - undangan, pasar saham, komisi bursa saham atau peraturan akuntansi dari

pihak yang berwenang, sedangkan *voluntary disclosure* merupakan informasi yang secara sukarela diungkapkan oleh perusahaan. Manajemen bebas memilih untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dianggap relevan dan mendukung pengambilan keputusan pemakai yang tertuang dalam pengungkapan sukarela laporan tahunan perusahaan. *Voluntary disclosure* tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap dan transparansi oleh pemakai laporan tahunan (Meek, *et al.* 1995).

Informasi yang tidak diungkapkan ini dapat merugikan *stakeholders*, salah satunya adalah kasus PT. Freeport selama bertahun-tahun beroperasi di Timika, Provinsi Papua, sehingga mampu memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaannya, ternyata masyarakat disekitar perusahaan masih tetap berada di bawah garis kemiskinan, banyak yang tidak memperoleh pendidikan, lingkungan sekitar tempat tinggal warga tercemar oleh limbah pertambangan sehingga banyak warga yang menderita berbagai penyakit, dan infra struktur tidak mengalami perbaikan.

Hal yang terjadi dalam kasus ini menyebabkan PT Freeport diguncang isu terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah tempat beroperasinya, yang berujung pada terjadinya berbagai aksi demonstrasi, baik oleh penduduk lokal maupun aktivis lingkungan, menyebabkan kegiatan perusahaan berhenti beberapa saat. Penghentian operasi perusahaan ini tentunya akan merugikan secara ekonomi karena keuntungan yang seharusnya diperoleh menjadi hilang. Saham PT. Freeport pun mengalami penurunan harga di bursa internasional. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengungkapan yang dilakukan PT

Freepot dalam pelaporan keuangannya, sehingga akan merugikan *stakeholders*.

Kasus ini adalah salah satu kasus yang terjadi pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh *voluntary disclosure* pada laporan tahunan perusahaan yang masih sangat rendah. Lemahnya penerapan *voluntary disclosure* pada perusahaan di Indonesia tidak terlepas dari peran mekanisme *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* merupakan salah satu alat untuk mengatur jalannya sistem yang terjadi di dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Clemente dan Labat (2005) menyebutkan bahwa *corporate governance* mempengaruhi pengungkapan.

Salah satu isu tata kelola perusahaan yang berkembang beberapa tahun terakhir adalah isu *board diversity* berbasis gender yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan sukarela atau *voluntary disclosure*. *Diversity* (keragaman) dapat dikatakan sebagai hal yang berbeda pada orang yang berbeda. *Board diversity* merupakan sebuah keragaman yang ada dalam jajaran top manajemen yang didasarkan pada berbagai hal misalnya gender, etnis, dan keahlian. *Board diversity* berbasis gender diartikan sebagai keragaman gender yang ada pada dewan komisaris.

Pentingnya *voluntary disclosure* telah membuat banyak peneliti untuk melakukan penelitian dan berdiskusi mengenai praktik dan faktor yang mempengaruhi *voluntary disclosure*. *Voluntary disclosure* perusahaan, serta faktor- faktor penentunya telah menjadi hal yang menarik bagi para peneliti

akuntansi sejak tahun 1970-an (Chau dan Gray 2010). Tingkat pengungkapan yang tepat memang harus ditentukan, karena pengungkapan informasi sukarela yang tepat akan memberikan informasi yang lebih bagi pengguna informasi (Suwadjono, 2006). Binh (2012), berhasil melakukan penelitian tentang informasi *voluntary disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan negara berkembang, yaitu perusahaan non keuangan yang terdaftar di pasar saham Vietnam. Peneliti ini mengikuti saran dari Sarikas dalam pengembangan penelitian, Vu, *et al.* (2011) karena sebagian besar penelitian tentang informasi pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan berpusat di negara maju.

Penelitian yang dilakukan Vu, *et al.* (2011) bertema sama mengenai *voluntary disclosure* yang dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Vietnam. Rendahnya tingkat pelaporan informasi sosial mungkin disebabkan oleh praktek *social disclosure* (pengungkapan sosial) yang relatif baru diterapkan di Vietnam. Penemuan Vu, *et al.* (2011) sejalan dengan La Porta, *et al.* (1999) dalam Vu, *et al.* (2011) yang menyatakan bahwa tingkat *voluntary disclosure* pada perusahaan di negara berkembang relative rendah. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghazali (2009) mengenai informasi *voluntary disclosure* dalam laporan tahunan pada perusahaan di Malaysia.

Penelitian tentang *voluntary disclosure* juga dilakukan oleh Amilia (2008), yaitu tentang faktor yang mempengaruhi pengungkapan melalui media website perusahaan merupakan *voluntary disclosure* dan tidak diregulasi oleh

badan tertentu pada beberapa negara berkembang, seperti juga di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa informasi pengungkapan sukarela atau *voluntary disclosure* pada laporan tahunan harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dan transparansi atas informasi yang digunakan oleh pemakai laporan tahunan perusahaan.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Nurkhayati dan Agung (2013), yang berjudul “*Pengaruh Corporate Governance Terhadap Voluntary Disclosure (Study Pada Perusahaan Bumn Di Indonesia)*”. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, peneliti menggunakan mekanisme *corporate governance*. Penelitian ini menggunakan studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013 dan menambah 3 variabel independen, yaitu proporsi komisaris wanita, *institutional ownership*, dan komite audit. Peneliti ingin menguji apakah hasil dari penelitian ini akan tetap signifikan jika ditambah variabel proporsi komisaris wanita, *institutional ownership*, dan komite audit sebagai variabel independen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah proporsi komisaris wanita berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*?

2. Apakah ukuran komisaris independen berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*?
3. Apakah *managerial ownership* berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*?
4. Apakah *institutional ownership* berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*?
5. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *voluntary disclosure* pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2011-2013.
2. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme *board gender* terhadap *voluntary disclosure* pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2011-2013.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi dari berbagai bidang yang berkaitan:

1. Teoritis

Penulis dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan proporsi komisaris wanita, ukuran dewan komisaris, *managerial ownership*, kepemilikan institusional, komite audit dan *voluntary disclosure*.

2. Praktis

- a. Bagi IAI, hasil riset ini untuk membuat suatu pedoman pengungkapan informasi akuntansi yang lebih akomodatif di Indonesia.
- b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan dan Penyusun SAK, hasil ini dapat membantu untuk mengembangkan, mengubah, menambah dan menjelaskan standar akuntansi yang berlaku untuk menciptakan pasar modal yang efisien.
- c. Bagi emiten, menambah pengetahuan mengenai minimum disclosure agar informasi yang disajikan dapat bermanfaat untuk analisis dan pengambilan keputusan investasi.
- d. Bagi investor, dapat memberikan masukan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan investasi.